

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN
LAHAN DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau*



RIO ANDIKA SAPUTRA
157310325

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jumlah Penduduk Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar	4
I.2	Jumlah Penduduk Desa yang ada di Kecamatan Tambang	6
I.3	Nama-nama Anggota Organisasi Masyarakat Peduli Api	10
I.4	Luas Lahan Kebakaran di Provinsi Riau.....	12
I.5	Jumlah Titik Api dimasing-masing Kecamatan Kabupaten Kampar ..	13
I.6	Jumlah Titik Api dimasing-masing Desa Kecamatan Tambang	14
II.1	Penelitian Terdahulu.....	44
II.2	Operasional Variabel Implementasi di Desa Rimbo Panjang	48
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Implementasi Program Masyarakat Peduli Api dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	55
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Program Masyarakat Peduli Api dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan	59
V.1	Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	79
V.2	Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	79
V.3	Distribusi Berdasarkan Umur	80
V.4	Distribusi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Indikator Komunikasi	82
V.5	Penilaian Terhadap Jawaban Responden (MPA) Mengenai Indikator Komunikasi.....	84
V.6	Distribusi Penelitian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Indikator Sumber Daya	86
V.7	Distribusi Jawaban Responden (MPA) Mengenai Indikator Sumber Daya.....	87
V.8	Distribusi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Indikator Disposisi.....	89

V.9	Distribusi Jawaban Responden (MPA) Mengenai Indikator Disposisi	91
V.10	Distribusi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Indikator Struktur Birokrasi.....	93
V.11	Penilaian Responden (MPA) Mengenai Indikator Struktur Birokrasi ..	94
V.12	Rekapitulasi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah)	96
V.13	Rekapitulasi Penilaian Responden Keseluruhan (MPA).....	97
V.14	Rekapitulasi Penilaian Secara Keseluruhan Mengenai Implementasi Program Masyarakat Peduli Api.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	45



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rio Andika Saputra

NPM : 157310325

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru,

Pelaku Pernyataan



Rio Andika Saputra

IMPLEMENTASI PROGRAM MASYARAKAT PEDULI API DALAM MENANGGULANGI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI DESA RIMBO PANJANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Rio Andika Saputra

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kebakaran Hutan.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan dasar aturan terkait dengan kerusakan hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang dan juga mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif dengan teknik analisis Deskriptif, penulisan ini menggambarkan kondisi secara objek yang ditemukan dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Desa Rimbo Panjang berkaitan dengan kerusakan lahan masyarakat. Dengan kuisisioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan data, dan data yang dikumpulkan kemudian disajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektifitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Terdapat 8 kelompok menjadi objek dalam penelitian. Penulisan terdiri dari data primer yang mana diperoleh melalui alat penelitian berupa kuisisioner dan daftar wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dengan alat bantu tabel frekuensi sesuai dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang dikategorikan Cukup Baik/Cukup Terimplementasi.

**THE IMPLEMENTATION OF A FIRE-CARE COMMUNITY PROGRAM TO
COMBACT FORETS FIRES IN THE RIMBO PANJANG KELURAHAN TAMBANG
IN KAMPAR DISTRICT**

ABSTRACT

Rio Andika Saputra

Keywords : Implementation, Policy, Forest Fires.

The purpose of the study was to describe the basic enforcement of rules related to the destruction of the forest and land in the Rimbo Panjang village and also describe the obstacles in its implementation. This study uses the Quantative method with Descriptive Analysis Techniques, this paper describes the conditions in the objects found in the field based on data data relating to problems that exist in Rimbo Panjang village relating to damage to public property, with Questionnaires and Interviews as data collection tools, and data collected then presented as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of existence and reseach objectives in the studied location. There were 8 groups as objects in the writing study consisting of primary data which were obtained through research tools in the from of questionnaires, and interview lists, and secondary data obtained by means of frequency tables in accordance with results of the study concluded that the implementation of this research is still implemented Poor/quite implemented.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.maka untuk mencapai tujuan tersebut di bentuklah Pemerintah serta di bagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Desar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan Undang-undang. Dan dalam pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan yang telah di amanat kan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi Urusan Pemerintahan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan umum.urusan Pemerintahan Absolute adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang di bagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang di serahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.Sedangkan Urusan Pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , jenis Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar meliputi :

- A. Pendidikan;
- B. Kesehatan;

- C. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- D. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- E. Ketentraman ,Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
- F. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana di atur dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- A. Tenaga kerja;
- B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- C. Pangan;
- D. Pertanahan;
- E. Lingkungan Hidup
- F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- G. Pemberdayaan masyarakat dan pencatatan sipil;
- H. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- I. Perhubungan;
- J. Komunikasi dan informatika;
- K. Koprasi,usaha kecil ,dan menengah;
- L. Penanaman Modal;
- M. Kemudahan dan olahraga;
- N. Statistik;
- O. Persadian;
- P. Kebudayaan;
- Q. Perpustakaan; dan
- R. Kearsipan

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana di atur dalam pasal 12 ayat (3) meliputi :

- A. Kelautan dan perikanan
- B. Pariwisata
- C. Pertanian;
- D. Kehutanan;
- E. Energi dan sumber daya mineral;
- F. Perdagangan;
- G. Perindustrian; dan
- H. Transmigrasi.

Berdasarkan Undang-undang No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dikatakan dalam pasal 2 : Penanggulangan Bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 ayat 1 Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasaskan:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. Keseimbangan,keselarasan, dan keserasian;
- e. Kebersamaan;
- f. Kelestarian lingkungan hidup;dan
- g. Ilmu pengetahuan dan teknologi

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah cukup besar dibanding Kabupaten lainnya yang ada di Riau.Kabupaten Kampar memiliki luas daerah sebesar 10.928,20 km².Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan yang dipadati penduduk secara total sebesar 793.005 jiwa.

Adapun data Kecamatan – Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Tabel I.I Jumlah Penduduk Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kampar Kiri	29.987
2	Kampar Kiri Hulu	11.876
3	Kampar Kiri Hilir	11.462
4	Kampar Kiri Tengah	19.736
5	Gunung Sahilan	26.953
6	XIII Koto Kampar	24.144
7	Koto Kampar Hulu	18.939
8	Kuok	25.186
9	Salo	25.954
10	Tapung	95.476
11	Tapung Hulu	81.936
12	Tapung Hilir	60.106

1	2	3
13	Bangkinang kota	39.773
14	Bangkinang	33.043
15	Kampar	50.555
16	Kampar Timur	24.528
17	Rumbio Jaya	17.192
18	Kampar Utara	17.242
19	Tambang	48.310
20	Siak Hulu	100.253
21	Perhetian Raja	17.637
	Jumlah	793.005

Sumber: BPS Kabupaten Kampar 2019

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah daratan yang berupa hutan. Luas hutan menurut peruntukannya dan Kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2015, luas hutan di daerah ini lebih kurang 497.029,77 Ha. Jika dirinci menurut penggunaannya sebagian besar yaitu sekitar 6,07% adalah hutan lindung, 11,09% hutan konservasi, 63,96% hutan produksi terbatas, 8,65% hutan produksi tetap.

Kecamatan Tambang adalah salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Provinsi Riau dengan luas Kecamatan 573,70 Km yang dilewati oleh jalan Negara sepanjang 36 Km ke arah Barat dan kurang lebih 6 Km ke arah Timur di sepanjang jalan Nasional ke arah Timur terletak beberapa yaitu Desa Rimbo Panjang, Desa Tambang, Desa Palung Raya. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tambang cukup mengalami peningkatan. Penduduk merupakan faktor utama dalam Pembangunan, karena penduduk merupakan subjek dari Pembangunan tersebut. Akan tetapi jumlah penduduk terlalu besar bisa menjadi suatu masalah dalam pelaksanaan Pembangunan, terutama sekali dalam upaya bagi penduduk tersebut dalam mendapatkan pekerjaan. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh besarnya tingkat Kelahiran, Kematian, dan tingkat Migrasi penduduk. Berdasarkan data di

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, jumlah Penduduk menurut masing-masing Desa, yaitu:

Tabel I.2. Jumlah Penduduk Desa Yang Ada di Kecamatan Tambang

No	Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tambang	1474	1503	2977
2	Kuapan	1499	1614	3113
3	Gobah	855	836	1691
4	Teluk Kenidai	907	717	1624
5	Aur Sati	1104	1092	2196
6	Padang Luas	1020	1080	2100
7	Terantang	1085	1047	2152
8	Kualu	2332	2182	4514
9	Rimbo Panjang	4314	3972	8286
10	Parit Baru	550	552	1102
11	Kemang Indah	791	786	1577
12	Kualu Nenas	1249	1368	2607
13	Tarai Bangun	4147	3873	8020
14	Sungai Pinang	885	842	1727
15	Palung Raya	470	552	1022
16	Pulau Permai	1158	1133	2291
17	Balam Jaya	635	686	1321
Jumlah		24.475	23.835	48.310

Sumber : Kantor Camat Tambang/*Office of Tambang Distric* 2019

Tabel ini merupakan gambaran umum penduduk Kecamatan Tambang pada Tahun 2019. 17 Desa yang ada di Kecamatan Tambang.

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah Desa di Kecamatan Tambang yang sekarang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Desa Rimbo Panjang yang membentang jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang lebih kurang 10 Km. Pada awalnya Desa Rimbo Panjang merupakan daerah hutan dan rimba yang mulai ditempati oleh masyarakat yang berasal dari Sumatera Barat pada Tahun 1951 yang cuma ditempati oleh hanya beberapa Kepala Keluarga.

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah Desa yang kehidupan masyarakat pertanian dan buruh harian. Hasil pertanian yang terkenal dan menjadi buah segar unggulan Kampar yaitu Nenas. Disamping itu ada juga Karet dan Sawit. Tapi sekarang sudah mulai bergeser menjadi daerah pemukiman dan industry dengan visi dan misi yaitu menjadikan Desa Rimbo Panjang sebagai satelitnya Kota Pekanbaru yang berbasis Pertanian, Industri, berazaskan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Tahun 2023.

Desa Rimbo Panjang terletak diwilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- a. Daerah Utara berbatasan dengan Desa Karya Indah
- b. Daerah Timur berbatasan dengan Pekanbaru dan Desa Tarai Bangun
- c. Daerah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Nenas
- d. Daerah Selatan berbatasan dengan Desa Parit Baru

Luas wilayah Desa Rimbo Panjang adalah 9000 Ha, yang sebagian besar adalah lahan Pertanian dan Perkebunan iklim. Desa Rimbo Panjang mempunyai musim kemarau dan penghujan yang mempengaruhi pola pertanian yang ada di Desa Rimbo Panjang.

Pemerintah berdasarkan kekuasaan konstitusi UUD 1945 berhak untuk mengatur dan menguasai masyarakat dalam hal kepentingan umum. Sehingga dalam konteks birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan nasional yaitu: tercapainya masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera.

Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran disaat musim kemarau. Pembuatan saluran/parit telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan dimusim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya gejala keringtak balik dan gambut berubah sifat seperti arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air.

Menejemen kebakaran berbasis masyarakat akan lebih baik diarahkan untuk kegiatan pencegahan dari pada usaha pemadaman kebakaran. Pencegahan kebakaran hutan merupakan salah satu komponen pengendalian kebakaran hutan yang mencakup semua cara untuk mengurangi atau meminimumkan jumlah kejadian kebakaran liar.

Pencegahan kebakaran hutan bukan bertujuan untuk menghilangkan semua kejadian kebakaran liar. Menghilangkan semua kejadian kebakaran hutan merupakan suatu hal yang sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan. Maka dari sebab itu pemerintah membentuk tim pencegahan kebakaran hutan yang diambil dari masyarakat setempat diwilayah rawan kebakaran hutan, agar pengendaliannya dapat berjalan dengan kondusif.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 pada pasal 22 ayat 2 dan 3 tentang

pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), Sedangkan di pasal 96 disebutkan tentang pemberdayaan dan penguatan kelembagaan, kemudian pada pasal 95 ayat 1, pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui:

- a. Pendidikan dan latihan
- b. Penguatan kelembagaan
- c. Fasilitas
- d. Penyuluhan

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pasal 96, dilakukan melalui kegiatan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah suatu Organisasi kelompok masyarakat yang dibentuk untuk membantu Pemerintah dalam hal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pembentukan Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) bertujuan untuk dapat meminimalisir kebakaran hutan yang terjadi di Desa Rimbo Panjang, mengingat masyarakat merupakan Stakeholder yang paling dekat dengan kawasan hutan.

Awal terbentuknya Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Rimbo Panjang yaitu pada awal Tahun 2010. Awal dibentuknya Organisasi Masyarakat Peduli Api ini hanya beranggotakan sebanyak 5 orang, akan tetapi dengan berjalannya waktu dan fenomena kebakaran hutan yang sering terjadi di Desa Rimbo Panjang maka anggota Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Rimbo Panjang saat ini sudah bertambah sebanyak 30 orang. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang pelaksanaan Program Masyarakat Peduli Api dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang. Dalam hal ini Masyarakat Peduli Api berkoordinasi dengan Manggala Agni yaitu merupakan Tim penanggulangan

kebakaran dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Maka dari itu terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Desa Rimbo Panjang, ini merupakan kewenangan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah setempat. Terkait dengan masalah penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Desa Rimbo Panjang melalui Dinas Lingkungan Hidup menjalankan Program Desa Bebas Api yang dilaksanakan oleh Manggala Agni yang terdiri dari pegawai negeri dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Yang menjadi dasar pembentukan Masyarakat Peduli Api yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Tabel I.3 Nama-nama Anggota Organisasi Masyarakat Peduli Api

No	Nama	Jabatan
1	Nendri	Ketua
2	Desridawati	Sekretaris
3	Zulhendri	Anggota
4	Wendri	Anggota
5	Sapriandi	Anggota
6	Afri Melta	Anggota
7	Anas mariono	Anggota
8	Oktavarido	Anggota
9	Nasrul	Anggota
10	Syarul	Anggota
11	By. Padang	Anggota
12	Sawir	Anggota
13	Tamar	Anggota
14	Yonedi	Anggota
15	Rio	Anggota
16	Jhoni	Anggota
17	Heri	Anggota
18	Rusli	Anggota
19	M.Syarif	Anggota
20	Afri	Anggota

Sumber : Data Olahan 2019

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Masyarakat Peduli Api (MPA) antara lain:

1. Memberikan informasi bilamana terjadi kebakaran hutan dan lahan
2. Menyebarkan informasi peringatan bahaya kebakaran hutan dan lahan
3. Melakukan Penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan petugas unit pengelola kawasan hutan atau lahan selaku peminanya.
4. Melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka memperkuat kelembagaanya.

Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) ini didahului dengan penetapan desa sasaran, meliputi desa yang berbatasan dengan kawasan hutan rawan kebakaran lahan dan berpotensi meluas ke hutan. Pembentukan Masyarakat Peduli Api dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan seperti perencanaan, persyaratan, pembekalan, dan penetapan. Calon anggota MPA harus berasal dari Desa sasaran yang berada dalam satu Kecamatan atau Desa-Desa yang berbatasan dengan kawasan hutan dan diusulkan oleh perangkat Desa atau Kecamatan yang membawahi Desa sasaran. Calon anggota MPA diharuskan untuk mengikuti pembekalan teknis yang berupa materi teori dan praktek dan disampaikan melalui metode diskusi dan simulasi.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dengan cara mengintegrasikan kebijakan Pemerintah dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan masyarakat dengan melakukan revitalisasi pembentukan kelompok peduli api, peningkatan keterampilan masyarakat dan sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, peningkatan kemampuan

masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian tanpa bakar, pengintegrasian antara pertanian dan peternakan serta penetapan sistem zonasi pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya pertanian(Sunanto, 2008).

Tabel 1.4 Luas lahan kebakaran di Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kebakaran
1	Rokan Hulu	2,25 Ha
2	Rokan Hilir	981,95 Ha
3	Dumai	307,75 Ha
4	Bengkalis	1524 Ha
5	Kep. Meranti	252,7 Ha
6	Siak	602,4 Ha
7	Pekanbaru	93,71 Ha
8	Kampar	130,5 Ha
9	Pelalawan	201 Ha
10	Indragiri Hulu	114 Ha
11	Indragir Hilir	525,85 Ha
12	Kuansing	5,1 Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2019

Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu wilayah yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya lahan baik untuk pertanian, perikanan, perkebunan dan hutan tanaman industry (HTI) sehingga yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan terutama pada musim kemarau, bahkan musibah ini menjadi langganan tetap setiap tahunnya. Maka dari itu tujuan dibentuknya Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) yaitu:

1. Meminimalkan potensi dan kejadian kebakaran yang diakibatkan aktifitas pembukaan lahan masyarakat secara tidak bijaksana.
2. Menciptakan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang berbasis pada kepedulian dan kebersamaan ditenaga masyarakat peladang.
3. Meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat.

4. Membentuk masyarakat yang sadar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar peduli terhadap kualitas lingkungannya dalam rangka terwujudnya masyarakat madani.

Masalah yang sering kali dihadapi Kabupaten Kampar secara khususnya dan secara umum di Riau yaitu dibeberapa tahun belakangan ini terutama pada saat musim kemarau panjang, Kabupaten Kampar selalu diselimuti kabut asap akibat pembakaran atau kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, salah satu wilayah Kecamatan yang sering terjadi kebakaran ditiap tahunnya dengan jumlah titik hotspot yang selalu meningkat yaitu di Kecamatan Tambang khususnya Desa Rimbo Panjang.

Tabel I.5 Jumlah Titik Api dimasing-masing Kecamatan Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Jumlah Titik Api (Tahun)			Jumlah
		2017	2018	2019	
1	Bangkinang Kota	-	-	-	-
2	Bangkinang	-	-	-	-
3	Kuok	2	3	2	7
4	Gunung Sahilan	3	4	6	13
5	Kampar	8	8	2	18
6	Kampar Kiri	4	4	3	11
7	Kampar Kiri Hilir	4	5	4	13
8	Kampar Kiri Hulu	1	2	2	5
9	Kampar Kiri Tengah	1	-	3	4
10	Koto Kampar Hulu	3	2	3	8
11	Kampar Timur	1	4	2	7
12	Kampar Utara	-	1	-	1
13	Perhentian Raja	-	-	4	4
14	Rumbio Jaya	-	-	1	1
15	Salo	3	5	2	10
16	Siak Hulu	4	-	4	8
17	Tambang	20	17	40	77
18	Tapung	5	14	9	28
19	Tapung Hilir	9	15	12	36
20	Tapung Hulu	10	17	13	40

1	2	3	4	5	6
21	XIII Koto Kampar	12	8	9	29
	Jumlah	90	109	121	320

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel diatas diperoleh informasi besaran titik api sebanyak (± 100 titik api) pada periode 2017-2019, selain itu di Kecamatan Tambang sebanyak 77 titik api, disebabkan adanya pembukaan lahan menjadi areal perkebunan dan pembukaan lahan untuk perumahan layak huni. demikian juga kebakaran ini terjadi dipengaruhi oleh sikap masyarakat dalam pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan dan pembukaan area perumahan.

Tabel I.6 Jumlah Titik Api di masing-masing Desa Kecamatan Tambang

No	Desa	Jumlah Titik Api (pertahun)		
		2017	2018	2019
1	Tambang	-	1	1
2	Kuapan	1	-	-
3	Gobah	1	-	-
4	Teluk Kenidai	2	1	2
5	Aur Sati	-	-	-
6	Padang Luas	-	-	-
7	Terantang	-	-	1
8	Kualu	1	1	1
9	Rimbo Panjang	10	8	26
10	Parit Baru	-	-	1
11	Kemang Indah	-	-	-
12	Kualu Nenas	1	1	3
13	Tarai Bangun	3	2	4
14	Sungai Pinang	1	-	1
15	Palung Raya	-	-	-
16	Pulau Permai	1	-	-
17	Balam Jaya	1	-	1
	Jumlah	22	14	41

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasannya titik api terbanyak yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yaitu di Desa Rimbo Panjang, dimana titik apinya sebanyak 44 titik dari tahun 2017 – 2019 hal ini disebabkan karena perilaku masyarakat yang tidak baik dalam membuka lahan perkebunan dan lahan perumahan yang disebabkan juga karna factor di Desa Rimbo Panjang memiliki tingkat gambut yang cukup tebal mencapai 3 m, hal ini sangat rawan akan kebakaran lahan.

Kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) telah terbentuk pada beberapa desa yang ada di Provinsi rawan kebakaran hutan, Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan. Namun faktanya kelembagaan MPA yang telah terbentuk tersebut belum diberdayakan secara maksimal, dan cenderung hanya difungsikan pada saat terjadinya peristiwa kebakaran hutan dan lahan, padahal potensi MPA dalam hal tindakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sangat besar , karena sebagai masyarakat tempatan, tentulah mereka yang paling berkepentingan dan mengetahui kondisi disekitar kawasan hutan dan lahan.

Keberadaan kelembagaan Masyarakat Peduli Api pada dasarnya telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan(Lemabran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4453);, Peraturan Mentri Kehutanan Nomor P.12/MENHUT-II/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, dan Peraturan Mentri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Dan Peraturan daerah Provinsi dan Kabupten atau Kota yang berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, namun belum ada aturan khusus yang mengatur lebih rinci tentang kelembagaan dan operasionalisasi Masyarakat Peduli Api. Belum adanya pengaturan khusus terkait dengan pemberdayaan kelembagaan Masyarakat Peduli Api berdampak terhadap belum maksimalnya pelaksanaan program, tugas dan fungsi kelembagaan serta sulitnya pembiayaan operasionalisasi kelembagaan Masyarakat Peduli Api.

Melihat keadaan yang ada, masalah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Desa Rimbo Panjang tepatnya pada musim kemarau yang panjang. Maka semua ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa fenomena yang ditemukan yang dapat menjadi penunjang penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Terindikasi kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rimbo Panjang.
- b. Terindikasi terbatasnya sarana dan prasarana pemadam maupun biaya yang diperuntukan untuk Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
- c. Terindikasi kurangnya Pemberdayaan yang dilakukan terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan didalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat mempengaruhi oleh tingkat interaksi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya Organisasi Masyarakat Peduli Api di Desa Rimbo Panjang membuat pengawasan terhadap hutan dapat lebih maksimal dan membantu aparat polisi dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat sekitar untuk menjaga kelestarian hutan dengan melaporkan setiap gerak gerik pelaku perusak hutan untuk ditindak lanjuti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas saya selaku peneliti merumuskan masalah yaitu, Bagaimana **Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?**

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

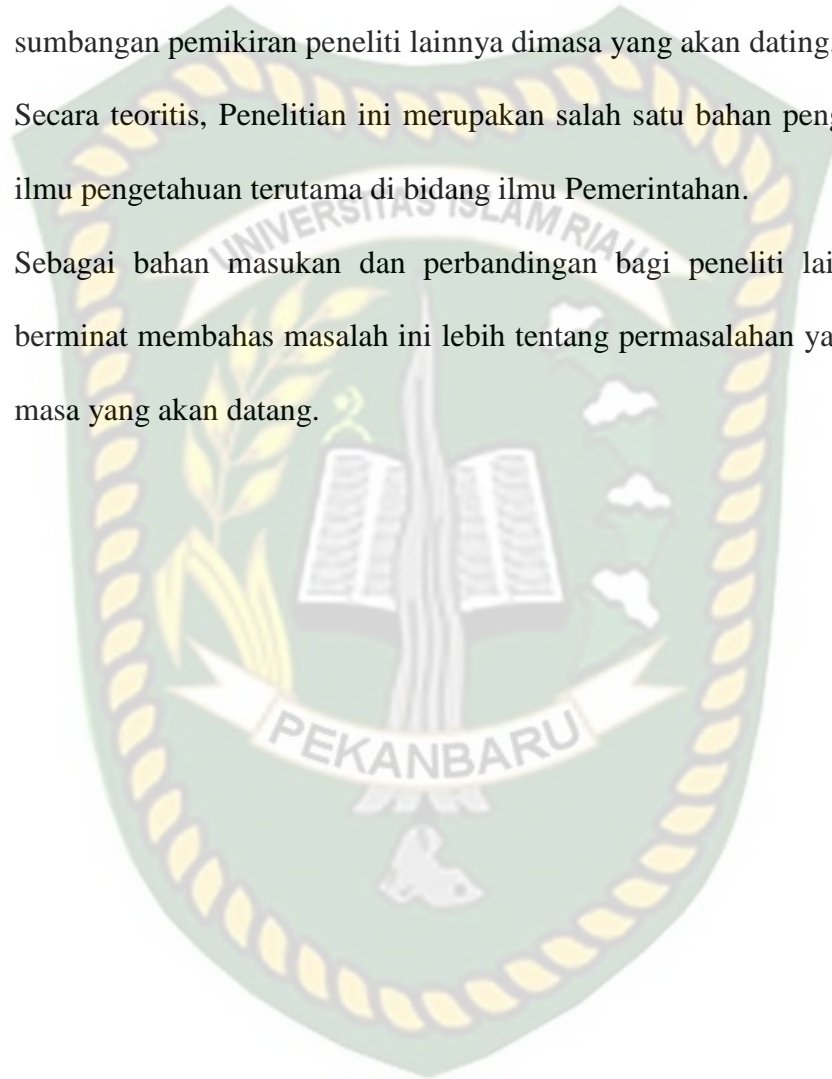
1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk melihat implementasi yang dilakukan oleh organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran

Hutan Dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik, Penelitian di harapkan sebagai bahan referensi dan sumbangan pemikiran peneliti lainnya dimasa yang akan datang.
- b. Secara teoritis, Penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu Pemerintahan.
- c. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah ini lebih tentang permasalahan yang sama di masa yang akan datang.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkain penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafii'e (2003: 18) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan krismatik menjalankan roda Pemerintahan.

Apabila ditinjau dari defenisi pemerintah (Syafii'e, 2005: 20) mengemukakan bahwa pemerintah, yang paling sedikit kata "perintah" tersebut memiliki dua unsure yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memiliki kewenangan dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Selanjutnya Sedarmayanti(2004:9) menyatakan bahwa Pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang menaati kedaulatan Rakyatnya, oleh karena itu tugas Pemerintah adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi keadilan sosial.

Menurut Mahfud (2001 :66) Pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan dalam Negara, yaitu Legislatif,Eksekutif,dan Yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan,lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahkan wewenang untuk mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintah(eksekutif) yang bisa dilakukan oleh cabinet dan aparat-aparatnya daritingkat pusat sampai kedaerah.

Sedangkan asas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah adalah yang dijelaskan oleh Syafii'e (2011:74)

1. Asas Desentralisasi

Adalah penyerahan sebagian urusan dari Pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

2. Asas Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepada instansi vertical atasnya, kepada penjabat-penjabat daerah.

3. Tugas Pembantuan

Adalah asas turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Menurut Ndraha (2003:5-6) pemerintah adalah sebuah system, multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil. Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan yang disebut pemerintah.

Lebih lanjut Ndraha (2003;6) mengartikan pemerintah adalah organ atau lembaga yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan. Sesuai dengan tuntunan yang diperintah.

Sedangkan menurut Montesquie (dalam Setiawan S, 2004:33) Pemerintah adalah seluruh lembaga Negara yang bisa dikenal dengan nama trias politica baik

itu legislative (membuat Undang-Undang), maupun Yudikatif(mengawasi pelaksanaan Undang-Undang).

Pemerintah menurut Wilson adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan umum-umum kemasyarakatan.(dalam Syafii'e)

Untuk itulah kita harus mengetahui makna dari ilmu pemerintahan. Menurut Ndraha(2003:&7) ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan Pemerintahan ,(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dari beberapa keterangan tentang Pemerintahan diatas, ternyata Pemerintahan juga mempunyai tujuan dari pembentukannya. Labobo (2007;25) menjelaskan tujuan utama dibentuknya Pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah tidaklah diadakan melayani dirinya, tetapi untuk melayani masyarakat, membentuk kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama.

2. Konsep Umum Organisasi dan Organisasi Pemerintahan

Organisasi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dalam kenyataannya sebagian besar orang hidup dalam organisasi dan menghabiskan waktu hidup mereka sebagai anggota organisasi.

Organisasi dapat dipahami dari berbagai macam sudut pandang atau perspektif sebagaimana menurut Richard dalam Thoha (2008:35) yaitu: sebagai kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan, sebagai koalisi pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrument untuk mengejar kepentingan masing-masing, sebagai suatu system terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung input dari lingkungan, sebagai alat dominasi.

Selanjutnya Djatmiko(2004:2) menyimpulkan dalam setiap organisasi terdapat 3 unsur dasar yaitu orang-orang (sekumpulan orang), kerja sama dan tujuan yang akan dicapai.

Selanjutnya Thoha (2008:35) berpendapat bahwa organisasi dimaknai sebagai wadah dimana sekelompok orang bekerja sama secara terkoordinasi dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan bersama.

Organisasi Pemerintahan dikenal dengan istilah birokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan Syafii'e (2000: 31) istilah birokrasi diberikan kepada instansi pemerintahan karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal (yang disebut birokrasi dan orang-orangnya disebut birokrat) merupakan bentuk yang sebagian besar diterima dan diterapkan oleh instansi Pemerintahan.

Menurut Ndraha (2003: 521) birokrasi Pemerintahan didefenisikan sebagai struktur pemerintahan yang berfungsi memproduksi jasa publik tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dari lingkungan. Thoha (2008:37) Organisasi Pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan bersama,yaitu: melindungi kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat , dan pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

Menurut Hamim (2005 : 40) mengatakan bahwa organisasi dan manajemen ikut berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Daerah, seperti halnya yang dikemukakan oleh Max Weber defenisi tentang organisasi terdiri atas seorang pemimpin, suatu staf administrasi dan masa masa anggota-angotanya.

Gibson C.S (dalam Winardi,2007:13) mengatakan bahwa oranisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri.

3. Konsep Kebijakan

Kata Kebijakan berasal dari kata “Polis” dalam bahasa Yunani (Greek) artinya “ Negara Kota”. Dalam Bahasa Latin Yaitu Politik atau Negara. Dalam bahasa inggris lama (Middle English) dinilai police yaitu berkaitan dengan unsur Pemerintahan atau Administrasi Pemerintah (Dunn, 2003;48)

Kebijakan adalah Suatu Ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang member batas dan arahan umum

kepada seseorang untuk bergerak, secara Etimologis Kebijakan adalah terjemahan dari kata Policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan kegiatan yang berulang dan rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan aturan keputusan.

Kemudian dalam bahasa Indonesia “Kata Kebijakan dan Kebijakan “ Bijak atau Bijaksana dalam bahasa Inggris “wisdom” asal katanya “wisei” dari pengertian ini sifat kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar pintar atau cerdas “(smart)”

Kebijakan Publik adalah Keputusan yang dibuat oleh Negara ,khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (Nugroho,2008;55)

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008:7) adalah apa yang dipilih oleh Pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan atau tidak dikerjakan. Rose (dalam Agustino , 2008:7) kebijakan public sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dari hal tersebut di ketahui bahwa kebijakan publik di kelompokkan menjadi tiga yaitu (Nugroho,2008;62)

- a. Kebijakan publik yang bersifat macro atau umum
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah
- c. Kebijakan Publik yang bersifat Mikro

Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008;3) Kebijakan adalah suatu kebijakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Menurut Andreson dalam Koryati (2005;7) mengemukakan bahwa Kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan institusi Pemerintah dan aparaturnya. sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa :

- a. Kebijakan Pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Kebijakan itu berisi tindakan tindakan atau pola pola tindakan pejabat Pemerintah
- c. Kebijakan merupakan apa yang benar benar dilakukan Pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan Pemerintah untuk melakukan sesuatu
- d. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti keputusan Pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tindakan melakukan
- e. Kebijakan Pemerintah dalam arti positif di dasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang undangan dan bersifat memaksa (otoritatif) untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik beberapa konsep jitu

Menurut Nugroho Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara Khususnya Pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang di cita citakan.

Pendapat Young dan Quinn dalam Edi Suharto Antara lain :

- a. Tindakan Pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh Badan Pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi dan financial untuk melakukan
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhandan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon maslah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal , melainkan terdiri dari beberapa pilohan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan maslah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor, kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah – langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah di rumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah Badan Pemerintah, maupun oleh beberapa Perwakilan Lembaga Pemerintah.

Menurut Dunn (2001 : 105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang releva dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengolahan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilain yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan penilain yang dimiliki oleh badan intansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilain terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuatan kebijakan.

Ndara (2003:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan Pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai Pemerintahan yang bersumber pada kearifan Pemerintahan dan mengikat secara formal,etik dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor Pemerintahan didalam lingkungan Pemerintahan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga

tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.(Kansil dan Cristie,2003:190).

4. Konsep Implementasi Kebijakan

Untuk melihat keberhasilan suatu Kebijakan (Program) maka sangat bergantung pada Implementasi Program itu sendiri.Dimana Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh yang di Programkan itu benar benar Memuaskan.

George C.Edwards III (dalam Sujianto.2008:15) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk Implementasi Kebijakan yang berhasil ?apakah rintangan rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses? Untuk itu perlu dipertimbangkan 4 Faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu :

a. Komunikasi

Yaitu menunjukkan bahwa setiap setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan(telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai,maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya.

c. Sikap (Disposisi)

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel berat pada implementor kebijakan atau program, karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

d. Struktur Birokrasi

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legislative dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Menurut Rian Nugroho (2005;158) Implementasi Kebijakan pada Prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melebihi formulasi kebijakan.

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012;45) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang undang di tetapkan yang member otoritas program, kebijakan,keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata, sementara itu Grindle dalam (Budi Winarno,2012:149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum , tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan tujuan Kebijakan bisa di realisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan Pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu Kebijakan atau program harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi public dimana actor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya di organisasikan secara bersama samam untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan. Implementasi Kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya Implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Menurut Gordon (2008:58) menyebutkan bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan ditetapkan dengan indicator sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah aktivitas aparatur birokrasi dalam mengorganisasikan atau mengelola segala sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit pelaksana tugas dan metode pelaksanaan program.

2. Interpretasi

Interprestasi adalah suatu aktivitas aparatur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu mewujudkan segala ketentuan yang telah di tetapkan dalam kebijakan dalam bentuk pengaturan atau penata laksanaan secara teknis dalam keadaan nyata.

3. Penerapan

Penerapan adalah suatu aktivitas aparatur birokrasi dalam implementasi kebijakan yaitu dengan mewujudkan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dalam bentuk program atau kegiatan.

Pendapat Grindle (1980) dalam Wirman (2012;45) Mengatakan Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paud dengan mekenisme penjabaran keputusan keputusan Politik kedalam Prosedur prosedur rutin lewat saluran saluran Birokrasi, melainkan lebih dari itu ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Pelaksanaan atau Implemtasi Kebijakan didalam konteks Manajemen berada didalam kerangka Organizing, Leading, Controlling, jadi Ketika Kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut .secara rinci kegiatan dalam manajemen Implementasi Kebijakan dapat di susun sebagai berikut; Nugroho (2005;24)

1. Tahap Implementasi Strategi.

a. Menyesuaikan Struktur dengan strategi

Yaitu adanya kesesuaian anta pengambil keputusan dengan rencana kebijakan.

b. Melembagakan strategi.

Yaitu adanya suatu strategi suatu organisasi atau lembaga yang menjalankan setiap kebijakan tersebut.

c. Mengoperasikan strategi

Yaitu menjelaskan setiap rencana awal kebijakan untuk menjelaskan

d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi

Yaitu adanya prosedur yang jelas guna memudahkan pelaksanaan kebijakan

2. Pengorganisasian (*Organizing*)**a. Kelurahan organisasi dan struktur organisasi**

Yaitu adanya suatu bentuk organisasi guna menjalankan kebijakan yang ada

b. Pembagian pekerjaan dan kelurahan pekerjaan

Yaitu jelasnya pembagian kerjaan dari pihak bentuk organisasi dalam pelaksanaan kebijakan

c. Interaksi dan koordinasi

Yaitu adanya hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan suatu kebijakan

d. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia

Yaitu menarik sumber daya manusia dan menempatkannya pada tempat yang tepat.

3. Pergerakan dan kepemimpinan**a. Efektifitas Kepemimpinan**

Yaitu kemampuan pemimpin dalam menjalankan suatu organisasi

b. Motivasi

Yaitu adanya dorongan dari pemimpin pada bawahan bekerja dengan lebih baik

c. Etika

Yaitu aturan yang dimiliki oleh pegawai dalam bekerja

d. Mutu

Yaitu hasil kerja yang dimiliki oleh organisasi

e. Kerjasama tim

Yaitu adanya kerjasama pegawai dalam organisasi untuk melakukan suatu kerjaan

f. Komunikasi organisasi

Yaitu komunikasi secara internal antar setiap pegawai serta dengan pemimpin

g. Negosiasi

Yaitu adanya kegiatan saling tukar pikiran satu orang dengan orang lain.

4. Pengendalian**a. Kelurahan pengendalian**

Yaitu melakukan penggambaran mengenai setiap kegiatan di dalam organisasi

b. Sistem informasi manajemen

Yaitu melakukan manajemen system yang baik untuk mendukung pekerjaan

c. Pengendalian anggaran atau keuangan

Yaitu menggunakan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran

d. Audit

Yaitu melakukan penilaian terhadap penggunaan anggaran.

Meter and Horn dalam Sujianto (2008 :71) mencoba mengadopsi model sistem Kebijakan yang pada dasarnya menyangkut beberapa komponen yang harus selalu ada agar tuntunan kebijakan bisa di Realisasikan menjadi hasil Kebijakan. Terdapat Enam Variabel yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan antara lain :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Yaitu memberikan perhatian utama pada factor factor yang mempengaruhi dan menentukan hasil kerja,maka identifikasi indicator indicator hasil kerja Merupakan hal yang penting karena indicator ini menilai sejauh mana standard an tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan.

2. Sumber Daya Kebijakan

Yaitu kebijakan mencakup lebih dari sekedar standard dan sasaran,tapi juga menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya ini dapat berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif.

3. Karakteristik Pelaksana

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan ukuran staf agen,dukungan legislatif dan eksekutif ,kekuatan organisasi, derajat

keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuatan kebijakan.

4. Aktifitas Keamanan dan Komunikasi antar Organisasi

Yaitu implementasi membutuhkan mekanisme dan prosedur institusional yang mengatur pola komunikasi antar organisasi mulai dari kewenangan yang lebih tinggi hingga yang terendah.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Yang pengaruh variabel lingkungan terhadap implementasi program, diantaranya sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, peran dan kelompok-kelompok kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan program.

6. Disposisi sikap para pelaksana

Yaitu persepsi pelaksanaan dalam organisasi dimana program itu diterapkan, hal ini dapat berupa sikap menolak, netral dan menerima yang berkaitan dengan sistem nilai pribadi, loyalitas, kepentingan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program dapat dilihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program-program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan didukung oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi-organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

5. Konsep Koordinasi

Penggunaan istilah koordinasi sering dipertukarkan atau dilakukan secara bergantian dengan istilah kerja sama (comperation), padahal koordinasi lebih dari sekedar kerja sama, karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerja sama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama .dengan demikian kerja sama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya untuk menciptakan kerja sama.

Koordinasi atau dalam bahasa inggris coordination, berasal dari bahasa latin yakni Cuma yang berarti berbeda-beda dan ordinare yang berarti penyusunan atau penempatan sesuatu pada seharusnya(Westra dalam Mulyasa, 2002:131),

Berdasarkan kutipan diatas, dapat dilihat suatu gambaran bahwa koordinasi adalah suatu kegiatan untuk menyatu padukan atau menyelaraskan berbagai pihak yang terkait dalam suatu kegiatan, sehingga nantinya terdapat kesamaan sikap, pandangan maupun tindakan yang dilakukan dalam aktivitas pencapai tujuan.

Pelaksanaan koordinasi dalam suatu organisasi merupakan tugas dari pimpinan organisasi, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Farlan (dalam Handayani, 1991:89) bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara para bawahannya dan menjamin kesatuan didalam pencapaian tujuan bersama. Adapun cara-cara pemimpin mengadakan koordinasi dengan bawahan menurut Malayu (2001:88) adalah:

- a. Memberikan keterangan langsung dengan cara bersahabat. Keterangan

mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan atau menghasilkan koordinasi yang baik.

- b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri, tujuannya itu adalah tujuan bersama.
- c. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan sebagainya.
- d. Mendorong para anggota berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.
- e. Membina human relation yang baik antara semua anggota
- f. Pemimpin sering melakukan komunikasi informasi dengan para bawahan, ringkasnya suatu koordinasi akan lebih baik jika diperoleh dukungan, partisipasi dari bawahan dan dari dukungan dari pihak-pihak terkait yang akan melakukan pekerjaan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, supaya mereka antusias dalam melaksanakannya.

Menurut Nitisemito (1985:121) Koordinasi adalah tindakan seseorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara pekerjaan yang dilakukan oleh seorang/bagian yang satu dengan yang lainnya. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran, ketidaktepatan, serta dobel pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Syarifudin (1985:121) Koordinasi adalah salah satu proses rangkaian kegiatan bertujuan membentuk , menyelaraskan tiap-tiap langkah dan kegiatan organisasi agar sasaran dapat dicapai. Untuk tetap terlaksananya koordinasi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, maka menurut Siagian (dalam Mulyasa, 2002:137) perlu melakukan cara-cara untuk mewujudkan koordinasi yang baik, yaitu:

- a. Memberikan pedoman
- b. Memberikan bimbingan
- c. Memberikan arahan
- d. Memberikan supervisi

6. Konsep Penanggulangan Bencana

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamantkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jenis-jenis bencana antara lain:

1. Gempa Bumi adalah merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Mekanisme kerusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan keseluruh bagian bumi.
2. Tsunami diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor.
3. Kebakaran adalah situasi dimana suatu tempat atau lahan atau bangunan dilanda api serta hasilnya menimbulkan kerugian keadaan dimana lahan dan hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan serta hasil-hasilnya serta menimbulkan kerugian.
4. Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.

5. Letusan Gunung Berapi adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah “Erupsi”. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko merusak dan mematikan.
6. Tanah Longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar dari lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau bebatuan penyusun lereng tersebut.
7. Banjir adalah suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai atau karena pengundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa.
8. Angin Topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan.
9. Kerusakan atau konflik social adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara atau kerusakan disuatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku atau organisasi tertentu.
10. Epidemii yaitu wabah atau kejadian luar biasa merupakan ancaman yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yang berjangkit disuatu wilayah tertentu.

7. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Secara Etimologis Pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemeberian daya /kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998:75)

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat masih memiliki daya , akan tetapi kadang – kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara

eksplicit. Oleh karena itu daya harus digali dan dikembangkan. Jika asumsi ini dikembangkan maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*) pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.(Tri Winari 1998:76).

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya,kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003: 43).

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsure partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subjek yang akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya objek menjadi subjek (Suparman dan Hempri, 2003:44).

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat local (Rahardjo Adisasmita, 2006 : 34). Partisipasi atau peran masyarakat dalam pembangunan (perdesaan) merupakan aktualisasi dari kesedian atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu untuk menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis menggangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada Penelitian Penulis.

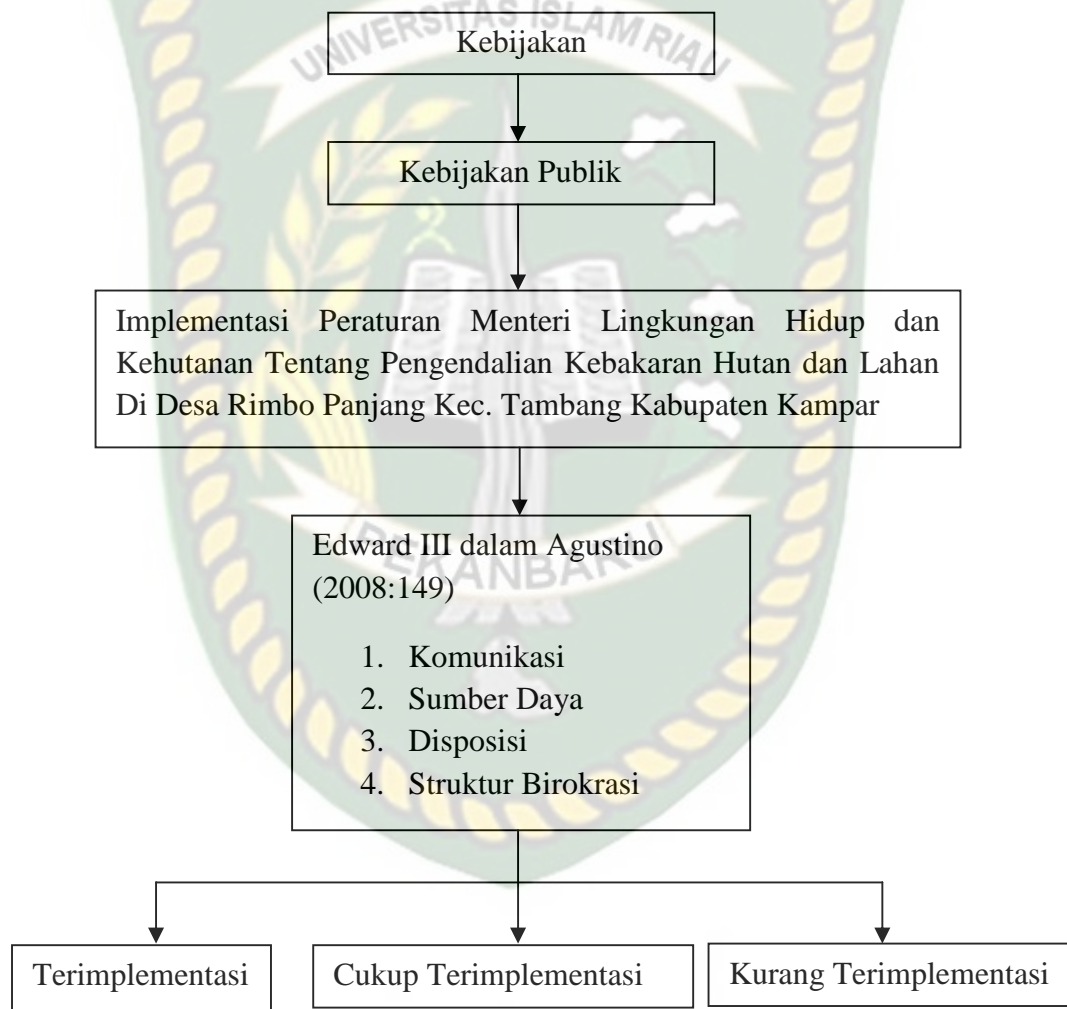
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti/ Tahun	Jurnal	Judul	Jenis Teori
1	2	3	4	5
1	Wiji Yuhana dan Iskandar / 2017	Jurnal Hutan Lestari (2017), Vol. 5, No.4 : 1016-1026. Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Pontianak.	Pertisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut (Studi Kasus Masyarakat Peduli Api Di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya)	Teori partisipasi
2	Romi Marnnelly / 2017	Jurnal Antropologi : Isu-isu Sosial Budaya. Vol. 20, No. 2 : 223-230, ISSN : 1410-8356, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unand.	Lembaga Masyarakat Peduli Api Studi Tentang Hambatan Pelaksanaan Peran	Teori Penanggula ngan bencana
3	Nurul Fadlillah, Sambas Basuni, Tutut Sunarminto / 2017	Jurnal Media Konservasi, Vol. 21, No. 3 : 216 – 224, Fakultas Kehutanan, IPB (Institut Pertanian Bogor)	Pengendalian Kebakaran Hutan Oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) di Taman Nasional Gunung Ciremai	Teori Penanggula ngan bencana

C. Kerangka Pikiran

Kerangka Pikir Tentang Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Gambar II.1. Kerangka Pikir Tentang Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis perlu untuk mengoperasionalkan konsep konsep tersebut, antara lain :

1. Pemerintahan adalah sekelompok orang orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dan mengordinasikan, memimpin, dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
2. Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan hambatan dan peluang peluang terhadap kebiakan yang diusulkan untuk nenggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
3. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melebihi formulasi kebijakan.
4. Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementer mengetahui apa yang harus di lakukan.

5. Sumber daya adalah walaupun isi kebijakan sudah di komunikasi secara jelas dan konsisten, apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melakukan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
6. Disposisi atau sikap para pelaksana adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi.
7. Struktur birokrasi merupakan hal penting dalam mempengaruhi dalam implementasi program atau kebijakan yang mencakup struktur birokrasi, norma dan pula hubungan.
8. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah kelompok masyarakat yang sukarela dan peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan lahan yang telah dilatih dan diberi pembekalan keterampilan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Kebakaran Hutan merupakan salah satu bencana alam yang dapat terjadi baik secara alam maupun oleh ulah manusia. Penyebab yang dapat memicu kebakaran hutan yaitu kemarau yang panjang.
11. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Implementasi Di Desa Rimbo Panjang

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Ukuran	
1	2	3	4	5	
Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Kansil dan Christie, 2003 : 190)	Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kabupaten Kampar	Komunikasi	a. Adanya sosialisasi b. Adanya peraturan yang jelas c. Adanya kejelasan sanksi	Baik Cukup Baik Kurang Baik	
		Sumber Daya	a. Tersedia personil yang cukup b. Tersedianya fasilitas yang mendukung c. Tersedianya dana untuk kegiatan operasional	Baik Cukup Baik Kurang Baik	
		Disposisi	a. Adanya pengetahuan b. Adanya pemahaman c. Adanya pengawasan sesuai Prosedur	Baik Cukup Baik Kurang Baik	

1	2	3	4	5
		Struktur Birokrasi	a. Adanya kejelasan fungsi dan kewenangan yang dimiliki instansi terkait b. Adanya koordinasi antar pihak yang terkait dengan sasaran kebijakan c. Adanya tanggung jawab antara instansi yang terkait	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Data Olahan 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk Mengetahui bagaimana implementasi Program Masyarakat Peduli Api dalam menangani kebakaran hutan dan lahan berikan pengukuran dengan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut :

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori terimplementasi berada pada masing-masing persentasi 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori cukup terimplementasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori kurang terimplementasi berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori komunikasi terimplementasi berada pada masing-masing persentase 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori komunikasi cukup terimplementasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori komunikasi kurang terimplementasi berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Sumber Daya

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori sumber daya terimplementasi berada pada masing-masing persentase 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori sumber daya cukup terimplementasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori sumber daya kurang terimplementasi berada pada pada rentang persentase 0%-33%

3. Disposisi

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori Disposisi terimplementasi berada pada masing-masing persentase 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori disposisi cukup terimplementasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori disposisi kurang terimplementasi berada pada pada rentang persentase 0%-33%

4. Struktur Birokrasi

Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori birokrasi terimplementasi berada pada masing-masing persentase 67%-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila Hasil tanggapan responden pada kategori birokrasi cukup terimplementasi berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori birokrasi kurang terimplementasi berada pada pada rentang persentase 0%-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif yaitu menerangkan dan menguraikan serta menganalisis data yang di peroleh dengan cara,kusioner, wawancara dan observasi terhadap fenomena-fenomena mengenai implemntasi Program Masyarakat Peduli Api dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Oleh karena itu, penulis berusaha menggambarkan, meringkaskan sebagai kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penulis tertarik untuk menjadikan Desa Rimbo Panjang sebagai lokasi penelitian karena pada hakikatnya hutan di Desa Rimbo Panjang ini berperan penting buat masyarakat karena hutan yang terjaga ekosistemnya akan bermanfaat bagi masyarakat setempat sebagai mata pencaharian, jika hutan ekosistem nya rusak seperti kebakaran hutan yang ada maka dapat menimbulkan bencana kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam menanggulangi kebakaran hutan maka dapat mengganggu kenyamanan.selain itu alasan penulis menemukan fenomena yang menarik untuk

di teliti dan lokasi penelitian yang dapat di jangkau oleh penulis untuk menghemat sumber daya. Penulis ingin melihat sejauh mana Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011;80)

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti, Menurut Sugiyono (2011: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk mengambil sampel harus menggunakan cara tertentu yang di dasarkan oleh pertimbangan pertimbangan yang ada.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Peduli Api di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Tabel III.I: Jumlah Populasi dan Sampel Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kabupaten Kampar

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar	1	1	100%
2	Kepala Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	1	100 %
3	Seksi Pemantauan Lingkungan	1	1	100 %
4	Seksi Pencemaran Lingkungan	1	1	100%
5	Manggala Agni	2	1	50%
6	Bhabinkamtibmas	1	1	100%
7	Babinsa	1	1	100%
8	Masyarakat Peduli Api	30	20	75%
Jumlah		38	27	6.5%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari Tabel Populasi dan sampel di atas mendeskripsikan bahwa yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup hingga Seksi kerusakan Lingkungan dan Manggala Agni, semuanya dijadikan populasi dan sampel di karenakan jumlah dari responden sedikit dan mudah di jangkau oleh penulis berdasarkan dari menggunakan teknik *purposive sampling*, kemudian selain dari Dinas Lingkungan Hidup, penulis juga mengambil masyarakat yang menjadi responden yaitu kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penerikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Adapun penarikan sampel dalam implementasi peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang Kec. Tambang Kabupaten Kampar. Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Masyarakat Peduli Api (MPA).

E. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang di gunakan yaitu :

1. Data Primer

Data Primer merupakan suatu sumber daya di peroleh langsung dari responden melalui wawancara, dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia, di peroleh dengan cara membaca laporan-laporan atau dokumen , peraturan-peraturan, dan buku – buku yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi tentang variabel-variabel yang akan di teliti dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuisisioner, Adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk di isi oleh responden, beberapa daftar pertanyaan tertulis dengan pertimbangan bahwa responden adalah subjek yang dianggap tau tentang objek peneliti. Seperti tanggapan responden yaitu Masyarakat Peduli Api di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Wawancara, dilakukan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, untuk memperoleh data atau keterangan – keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden.
3. Observasi, digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap gejala – gejala yang akan di teliti
4. Dokumentasi, digunakan untuk memperoleh keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen, (1992) analisis data adalah proses pencarian atau penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan. Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa analisis data ialah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. (Husaini 2009:84)

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya di kelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta fakta dilapangan untuk kemudian diambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang di dasarkan tata cara ilmiah.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

	Jenis kegiatan	Tahun 2019/ bulan/ minggu																											
		Januari				Februari				Maret				September				Oktober				Desember							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan penyusunan	■	■	■	■																								
2	Seminar proposal									■	■	■	■																
3	Perbaikan proposal										■	■	■																
4	Survey lapangan										■	■	■																
5	Analisi data													■	■	■	■												
6	Bimbingan skripsi															■	■	■	■	■	■								
7	Perbaikan bab per bab																	■	■	■	■								
8	Ujian skripsi																			■	■	■	■	■	■				
9	Perbaikan skripsi																					■	■	■	■				
10	Pengandaan skripsi																												■

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Penyusunan Laporan ini dapat di kemukakan berdasarkan sistematika Penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini berisikan penguraian dari pengertian, definisi konsep dan teori-teori yang menyangkut daftar pustaka. Di lanjutkan dengan kerangka piker, konsep operasional dan operasional variable pengukuran variable.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal kegiatan penelitian dan rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai diskripsi dan gambaran umum tentang situasi dan kondisi lokasi penelitian

BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas permasalahan yang akan penulis teliti mengenai implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan dan di berikan saran atas temuan tersebut



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, dengan batas wilayah administrasi kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40'' Lintang Utara sampai 0° 27'00'' Lintang Selatan dan 100°28'30'' – 101°14'30'' Bujur Timur. Batas-batas daerah kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi

Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatra Barat)

Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan kota pekanbaru pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Riau Nomor : KPTS.318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Keca dibawahmatan dengan 2 pembantu Bupati.Pembantu Bupati wilayah I berkedudukan di Pasir Pengarain dan pembantu Bupati II di Pangkalan Kerinci.Pembantu Bupati wilayah I mengkoordinir wilayah kecamatan Rambah, Tandun,Rokan IV Koto, Kunto Darusalam, Kepenuhan dan Tambusai. Pembantu Bupati wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam,Pangkalan Kuras, Bunut , dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati Wilayah I & II berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya, kedua puluh satu kecamatan tersebut(beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang (Kecamatan : Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (Kecamatan: Kuok)
3. Bangkinang Seberang (Kecamatan: Muara Uwai)
4. Gunung Sahilan (Kecamatan: Kebun Durian)
5. Kampar (Kecamatan : Air Tiris)
6. Kampar Kiri Hilir (Kecamatan: Gema)
7. Kampar Kiri Hilir (Kecamatan : Sei.Pagar)
8. Kampar Kiri Hulu (Kecamatan: Gema)
9. Kampar Timur (Kecamatan: Kampar)
10. Kampar Utara (Kecamatan: Desa Sawah)

11. Perhentian Raja (Kecamatan: Pantai Raja)
12. Rumbio Jaya (Kecamatan: Teratak)
13. Salo (Kecamatan: Salo)
14. Siak Hulu (Kecamatan: Pangkalan Baru)
15. Tambang (Kecamatan : Sei.Pinang)
16. Tapung (Kecamatan: Petapahan)
17. Tapung Hilir (Kecamatan: Kota Garo)
18. Tapung Hulu (Kecamatan: Sinama Nenek)
19. XII Koto Kampar (Kecamatan: Batu Bersurat)
20. Kampar Kiri Tengah (Kecamatan: Simalinyang)
21. Koto Kampar Hulu (Kecamatan: Tanjung)

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya sungai Kampar yang panjangnya 413,5 km dengan kedalamannya rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten Kampar yang meliputi kecamatan XII koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian sungai siak bagian hulu yakni panjangnya 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat dikabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana penghubung, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energy listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum

terjadi pada juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

Jumlah penduduk kabupaten Kampar pada tahun 2012 berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 orang, penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang tetap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar disebagian wilayah Kampar dengan persukuan Domo, Melayu, Piliang, Mandailiang, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang,dll. Secara sejarah etnis adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Penduduk dikecamatan Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah agama islam yang jumlahnya hampir 90% dari total seluruh pemilik agama yang ada di Kabupaten Kampar.

2. Gambaran Umum Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang didirikan pada tahun 1980 dengan status perwakilan Kecamatan Kampar Tambang dari hasil pemekaran Kecamatan Kampar baru dipenitipkan pada tahun 1995 dengan nama Kecamatan Tambang.

Kecamatan Tambang merupakan salah satu Kecamatan di kabupaten Kampar yang luas wilayah menurut pengukuran kantor camat tambang adalah 466,70 km² atau 46,670 Ha, mempunyai 14 desa dengan pusat pemerintahan desa sungai pinang. Pada akhir tahun 2004 kecamatan tambang mempunyai penduduk sebanyak 33,325 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 71 jiwa/km². Dilihat dari batasan wilayah kecamatan tambang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Tambang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Pekanbaru
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota.

Pada pasal 126 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa :

1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaannya tugasnya diperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota.

Camat yang mempunyai tugas secara umum memimpin penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintahan desa memiliki tugas dan kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan koordinasi atas instansi vertikal. Antara instansi vertikal dengan dinas di daerah, dan antara instansi lain di daerah kecamatan. Camat juga disebut sebagai atasan atau pimpinan dalam instansi yang di pimpinnya. Dengan kata lain bahwa camat dituntut untuk dapat menggerakkan serta membina

para bawahannya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang menjadi kewajiban sebagai pimpinan kecamatan yang membawahnya struktur pemerintahan desa lainnya.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 1984 menjelaskan bahwa camat selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten diwilayah kerja kecamatan dan berfungsi sebagai :

1. Administrator pemerintahan yang bertugas dan bertanggung jawab berupa penyelenggara birokrasi seperti pembuatan E-KTP, IMB, SKGR.
2. Administrator pembangunan bertugas dan bertanggung jawab berupa upaya memelihara kebersihan lingkungan masyarakat, penyelenggaraan perangkat desa sampai ketingkat RT dan Dusun, serta mengupayakan sarana dan prasarana.
3. Administrator pembangunan bertugas dan bertanggung jawab dalam memelihara ketertiban masyarakat dalam bidang keamanan dan kesehatan berupa pengadaan pos kamling dan posyandu.

3. Gambaran Umum Desa Rimbo Panjang

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah desa di Kecamatan Tambang yang sekarang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru. Desa Rimbo Panjang yang membentang jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang lebih kurang 10 Km persegi. Pada awalnya desa rimbo panjang merupakan daerah hutan dan rimba yang mulai ditempati oleh masyarakat yang berasal dari Sumatra Barat pada tahun 1951 yang Cuma ditempati oleh beberapa kepala keluarga.

Seiring dengan waktu dan sudah mulai banyaknya ditempati oleh warga dari Sumatra Barat maka pada tahun 1971 diusulkan menjadi desa muda sampai tahun 1974 yang dipimpin oleh bapak Abdul Malik Yusuf, kemudian pada tahun 1979 diusulkan menjadi desa definitif sampai dengan sekarang, selama kurun waktu tersebut sudah dipimpin oleh 4 kepala desa yaitu Abdul Malik Yusuf, Dasrul AR, Masril, Zalka Putra, dan Heri sampai dengan sekarang.

Rimbo panjang adalah sebuah desa yang kehidupan masyarakat adalah pertanian dan buruh harian. Hasil pertanian yang paling terkenal dan menjadi buah segar unggulan Kampar yaitu nenas. Selain itu ada juga karet dan sawit. Tapi sekarang sudah mulai bergeser menjadi daerah pemukiman masyarakat dan daerah industri sesuai dengan visi dan misi yaitu menjadikan rimbo panjang sebagai satelitnya kota pekanbaru yang berbasis pertanian, industry, berazaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan misi Desa Rimbo Panjang adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
2. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.
3. Pembangunan sarana pendidikan
4. Pembangunan sarana ibadah dan sekolah MDA.
5. Perbaikan pengairan.
6. Pembinaan untuk generasi muda
7. Mempermudah izin usaha.
8. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat

9. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat
10. Peningkatan kapasitas perangkat desa
11. Peningkatan sarana dan prasarana kerja perangkat desa

B. Demografi Desa Rimbo Panjang

Penduduk dan perkembangannya pada suatu daerah dari waktu ke waktu dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu kelahiran atau terjadinya suatu proses penurunan tingkat kematian yang tidak diikuti oleh perbedaan diantara tingkat kelahiran atau tingkat kematian. Faktor lain adalah migrasi yaitu : perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Begitu juga halnya dengan daerah Rimbo Panjang Kecamatan Tambang perkembangan penduduknya juga tidak lepas dari faktor-faktor kelahiran dan migrasi.

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah, oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangua suatu bangsa. Untuk itu tingkat pertumbuhan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan berdasarkan data statistic 2018 di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang.

Desa Rimbo Panjang terletak dalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Daerah Utara berbatasan dengan Desa Karya Indah
2. Daerah Timur berbatasan dengan Pekanbaru dan Kualu
3. Daerah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Nenas
4. Daerah Selatan Berbatasan dengan Desa Parit Baru

Luas wilayah desa rimbo panjang adalah 9000 Ha, yang sebagian besar merupakan lahan pertanian dan perkebunan iklim desa Rimbo Panjang mempunyai musim kemarau dan penghujan yang juga mempengaruhi pola pertanian yang ada di Desa Rimbo Panjang.

1. Keadaan Sosial

Penduduk desa rimbo panjang berasal dari beberapa daerah yang berbeda-beda dimana mayoritas penduduknya berasal dari provinsi Sumatra Barat.

2. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa rimbo panjang secara mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariaanya di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan perkebunan sawit sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, pemda, honorer, guru, tenaga medis, dll.

3. Pembagian Wilayah Desa Rimbo Panjang

Pembagian wilayah Desa Rimbo Panjang dibagi atas 3 Dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi disetiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun. Setiap dusun terdiri dari RT dan RW.

C. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten. Dinas Lingkungan Hidup

mempunyai tugas pokok dalam membantu Bupati menentukan kebijakan di bidang pengendalian, konservasi, rehabilitas, dan pelestarian lingkungan hidup, serta melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan peraturan Bupati Kampar tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Tugasnya : menjalankan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya.

2. Sekretariat

Tugasnya : menyelenggarakan kerjasama sesuai dengan kewenangannya dan menjalankan tugas lainnya dari atasan.

Fungsinya :

- a. Menjalankan operasional pelayanan administrasi kesekretariatan
- b. Kerjasama dalam penyusunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pengelolaan system penyampaian informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan system informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
- f. Penginventarisasikan permasalahan menjadi bahan telaah dan petunjuk pemecah masalah;

- g. Pelaksanaan kerja sama dengan unit kerja/kelembagaan dibidang tugasnya;
- h. Pemeberian sarana dengan tugas bidangnya;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap bawahanya;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
- k. Koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu;

3. Bagian Tata Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugasnya : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas pengelolaan serta pembagian tugas lain dari kepala Dinas.

Fungsinya :

- a. Merancang kebijakan teknis bagian tata lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mencipta rencana tindak kerusakan terhadap lingkungan hidup.
- b. Inventarisasi dan evaluasi RPPLH;
- c. Koordinasi dan singkronisasi RPPLH;
- d. Koordinasi dan penentuan kekuatan dan wadah lingkungan hidup;
- e. Merancang ekonomi lingkungan hidup;
- f. Penyusunan NSDA dan SLHD serta indeks kualitas Lingkungan Hidup;
- g. Penyusunan dan perbaikan KLHS;

- h. Kerjasama dalam menyusun bagian pencegahan pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Izin lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);
- i. Penilaian, pemeriksaan atau verifikasi dokumen lingkungan hidup dan proses izin lingkungan;
- j. Penyusunan kebijakan, identifikasi, verifikasi, dan validasi, serta penetapan penguatan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- k. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan local dan pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- l. Penyusunan data dan informasi;
- m. Penyusunan dan kebijakan penguatan kemampuan, penyelenggaraan diklat dan pendampingan terhadap MHA, kearifan atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- n. Menyusun model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA;
- o. Peningkatan dan pelaksanaan Diklat;
- p. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Penyiapan kebutuhan dan penyampaian sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- r. Pengembangan, penyusunan kebijakan, penilaian, dan pemberian penghargaan penghijauan LH;

- s. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan pemberian penghargaan penghijaun;
- t. Penyampain hasil sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. Pemberian tugas dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- v. Memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

4. Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3

Tugasnya : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah.

5. Bagian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Tugasnya : menyelenggarakan kebijakan pemantauan, pembinaan, pencegahan, dan pemulihan terhadap pencemaran kerusakan lingkungan hidup serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsinya :

- a. Menjalankan peraturan bagian pengendalian pencemaran lingkungan serta kerusakan dalam rangka menghasilkan rencana tindak untuk mengurangi kerusakan;
- b. Pelaksanaan pemantaun lingkungan.
- c. Pemantaun kualitas lingkungan.
- d. Merencanakan sarpas pengintaian lingkungan
- e. Pengendalian pencemaran dari sumber pencemaran lembaga maupun non lembaga.
- f. Pengintaian kualitas sumber pencemaran.

- g. Melakukan pembaharuan terhadap system informasi layanan terkait dengan informasi kerusakan dan dampaknya.
- h. Penyusuna kebijakan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. Menjalankan pemberdayaan terhadap lokasi kerusakan.
- j. Pelaksanaan proses perizinan pembuangan limbah cair.
- k. Ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- l. Pelaksanaan dan pemantauan karhutla.
- m. Pelaksanaan pemantauan dan penanggulangan kerusakan lingkungan.
- n. Pelaksanaan pemulihan kerusakan lingkungan hidup.
- o. Pemantaaun dan pembinaan bahan perusak ozon (BPO).
- p. Penyampain saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai TUPOKSI.
- q. Menjalankan tugas lain dari atas sesuai kewenangan.
- r. Pelaksanaan tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya terdiri dari, bagian pemantauan lingkungan, bagian pencemaran lingkungan, bagian kerusakan dan pemulihan lingkungan.

6. Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Tugasnya : menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, pelayanan pengaduan dan menjalankan peraturan terkait dan melaksanakan kebijakan tersebut hingga pemeliharaan lingkungan hidup dan kovensi sumber daya demi

mewujudkan kualitas lingkungan serta tugas-tugasnya yang lain yang diberikan.

Fungsinya :

- a. Membuat kebijakan bagian penataan serta pemeliharaan lingkungan hidup untuk menghasilkan rencana tindak penegak hukum lingkungan dan pengawasan lingkungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.
- b. Membuat peraturan terkait pengaduan.
- c. Pelaksanaan pelayanan, verifikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup.
- d. Menjalankan pembinaan terkait hasil tindak lanjut pengaduan.
- e. Menuntaskan permasalahan lingkungan.
- f. Penyuluhan dan meningkatkan system informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan kegiatan yang sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Merancang peraturan terhadap petugas pengawas lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Pembinaan monitoring pelaporan pelaksanaan izin lingkungan.
- i. Pemberdayaan terhadap petugas pengawasan lingkungan hidup daerah.
- j. Membuat tim kerja sama dan pelaksanaan proses peningkatan hukum atas pelanggaran perlindungan dan lingkungan hidup.
- k. Menjalankan perlindungan sumber daya alam.
- l. Melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- m. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.

- n. Membuat dan penetapan peraturan dan pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati.
- o. Melihat dan menjaga konservasi keanekaragaman hayati.
- p. Menyelesaikan masalah dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- q. Pengembangan system informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- r. Menyampaikan saran sesuai bagian tugasnya.
- s. Memberikan saran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- t. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada dinas sesuai dengan bidang tugasnya. susunan organisasi bagian penataan dan pemeliharaan lingkungan hidup terdiri dari:
 - 1. Bagian pelayanan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan
 - 2. Bagian pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup
 - 3. Bagian pemeliharaan lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang terkait dengan dasar aturan yang dijelaskan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada kuisisioner penelitian yang diawali dengan identitas responden. Hal ini mempunyai tugas dan tujuan untuk lebih mengetahui tingkatan dari populasi yang dijadikan responden dalam melakukan penelitian.

Namun sebelum memiliki hasil dari penelitian penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu identitas responden yang dianggap merupakan hal penting yang ingin penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pekerjaan dan diyakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk pekerjaan dan diyakini berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap cara berfikir dan tingkat wawasan yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat memberikan penjelasan identitas responden tingkat pendidikan akhir. Di bawah ini adalah penjelasan lebih lanjut terkait responden yaitu:

Tabel V.1 : Distribusi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	SD	-	-
2	SMP	5	33%
3	SMA	13	48%
4	D III	-	-
5	S.1	2	19%
Jumlah		20	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan data yang berhasil diperoleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden anggota Masyarakat Peduli Api bahwa dari 20 orang yang dijadikan responden, sebanyak 5 orang untuk lulusan SMP, 13 orang untuk lulusan SMA dan 2 orang untuk lulusan Strata satu.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin untuk menilai permasalahan yang diangkat oleh penulis dapat, dilihat pada table dibawah ini :

Tabel V.2 :Distribusi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki- laki	19 orang	90%
2	Perempuan	1 orang	10%
Jumlah		20 orang	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden anggota Masyarakat Peduli Api dalam memberikan tanggapan terhadap penanggulangan bencana kebakaran,

dimana laki-laki sebanyak 19 orang atau 90 % responden dan 1 orang perempuan atau 10 % responden untuk menilai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. Identitas Responden Penelitian Berdasarkan Umur

Tabel V.3 : Distribusi Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30	10 Orang	58%
2	31-40	6 Orang	25%
3	41-50	4 orang	17%
4	>50	-	-
Jumlah		20 Orang	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dilihat dari tabel diatas, dalam pengumpulan data identitas responden dari anggota Masyarakat Peduli Api berdasarkan tingkat usia, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa yang berdominasi tingkat umur atau usia responden berada pada tingkat usia 20-30 tahun berjumlah sebanyak 10 responden dengan persentase 58%

B. Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Adanya pembentukan pemerintah daerah tidak terlepas dari diberikannya otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangga daerah masing-masing. Tujuan otonomi daerah pada hakikatnya untuk memperlancar pembangunan tiap-tiap daerah. Tujuan pokok pemerintah daerah di era otonomi daerah ini, terjadi perbedaan konsep tentang peranan pemerintah terhadap rakyat :

pertama ada yang berpendapat bahwa pemerintah harus mengurangi keikutsertaan dalam mengatur sebanyak mungkin segi dari kehidupan masyarakat, karena hanya dengan cara itu, keteraturan, ketertiban, keamanan, dan kemajuan akan dapat diraih. Kemudian dilihat jawaban dari responden mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis terkait dengan pelaksanaan program yang dijalankan oleh Masyarakat Peduli Api di Desa Rimbo Panjang yang terdiri dari :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses interaksi dalam penyampaian informasi dari seseorang atau kelompok organisasi pemerintah kepada pihak lain dengan menggunakan media dan cara penyampaian yang dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi (Goyer.1970:7). Efektif atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan, salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi , baik itu antara sesama aparatur pemerintah maupun antara aparat pemerintah dengan masyarakat.

Tabel V.4 Distribusi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Indikator Komunikasi

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup mengenai program masyarakat peduli api	7	-	-	7
2	Peraturan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pembakaran secara liar	5	-	-	7
3	Sanksi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pembakaran lahan secara liar	5	2	-	7
Jumlah		17	4	-	21
Rata-rata		6	1	-	7
Persentase		80%	20%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 7 dari 7 orang responden menyatakan indikator komunikasi pada poin pertama terkait dengan Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengenai program masyarakat peduli api sudah dilaksanakan dengan Baik (terimplementasi), pada poin kedua terkait dengan Peraturan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pembakaran secara liar, 5 dari 7 orang mengatakan Baik (terimplementasi) dan 2 dari 7 orang mengatakan Cukup Terimplementasi, dan untuk poin ketiga

terkait dengan sanksi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pembakaran lahan secara liar, 5 dari 7 orang mengatakan Baik (terimplementasi) dan 2 dari 7 orang mengatakan Cukup Terimplementasi, dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator komunikasi sudah dijalankan dengan Baik (terimplementasi).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustiyardi, ST,M.Si selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup, pada tanggal 23 September 2019 beliau menyatakan :

“Kami selaku pihak dinas telah melakukan kegiatan sosialisasi ke beberapa desa yang rawan terjadi kebakaran lahan seperti desa rimbo panjang, desa tarai bangun, desa teluk kenidai, sosialisasi yang kami berikan bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan pengolahan lingkungan dan dampak dari kerusakan lingkungan”

Sedangkan tanggapan menurut responden (Masyarakat Peduli Api) mengenai indikator Komunikasi

Tabel V.5 Penilaian Terhadap Jawaban Responden (Masyarakat Peduli Api) Mengenai Indikator Komunikasi .

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Sosialisasi yang dilakukakn Dinas Lingkungan Hidup mengenai program masyarakat peduli api	4	14	2	20
2	Peraturan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pembakaran secara liar	2	15	3	20

3	Sanksi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pembakaran lahan secara liar	2	16	2	20
Jumlah		8	45	7	60
Rata-rata		3	15	2	20
Persentase		13 %	75 %	12 %	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.5 diatas diketahui bahwa jawaban responden (Masyarakat Peduli Api) terkait dengan indikator komunikasi sudah terlaksanakan Cukup Terimplementasi, hal itu dapat dilihat dari hasil persentase jawaban pertanyaan dari poin pertama hingga kedua.

Pada poin pertama mengenai sosialisasi yang dilakukakn Dinas Lingkungan Hidup mengenai program masyarakat peduli api, 4 dari 20 orang responden mengatakan baik (terimplementasi), 14 orang mengatakan Cukup Terimplementasi dan 2 orang mengatakan Kurang Terimplementasi, begitu juga dengan poin kedua mengenai Peraturan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pembakaran secara liar, 2 orang dari 20 responden mengatakan Baik (terimplementasi), 15 orang dari 20 responden yang mangatakan Cukup Terimplementasi, dan kemudian 3 orang yang mengatakan Kurang Terimplementasi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa indikator komunikasi berdasarkan hasil dari jawaban responden (Masyarakat Peduli Api) dapat dikategorikan Cukup Terimplementasi. sedangkan pada poin yang ketiga mengenai Sanksi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku pembakaran lahan secara liar, 2 dari 20 orang responden mengatakan Baik

(terimplementasi), 16 dari 20 orang mengatakan Cukup Terimplementasi dan 3 dari 20 orang mengatakan Kurang Terimplementasi. hal ini dapat disimpulkan terkait indikator pertanyaan komunikasi berdasarkan hasil dari responden (Masyarakat Peduli Api) dapat dikategorikan Cukup Terimplementasi.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Wendri selaku Masyarakat Peduli Api di Desa Rimbo Panjang, pada tanggal 25 September 2019 beliau menyatakan:

“Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh dinas tersebut memang telah dilaksanakan, tetapi kami selaku masyarakat belum memahami secara jelas dari materi yang diberikan oleh dinas terkait”

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti berkaitan dengan indikator komunikasi, peneliti menilai bahwa terkait dengan indikator komunikasi dapat diketahui bahwasanya aparat pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi kepada beberapa Desa terkait dengan pengelolaan lahan dan dampak dari rusaknya, tetapi dari pihak masyarakat masih ada yang kurang memahami secara jelas terkait dengan materi yang diberikan, sehingga indikator komunikasi dapat dinilai Cukup Terimplementasi.

2. Sumber Daya

Menurut Nasution (2000:5) mendefinisikan sumber daya adalah perencanaan pengarahannya atas tenaga kerja atau orang dalam pengembangan integrasi dan pemeliharaan hubungan kerja untuk mencapai suatu sasaran individu ataupun kelompok. Sumber daya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Dalam hal ini sumber daya lah yang

membantu keberhasilan Implementasi Program Masyarakat Peduli Api, yaitu berapa jumlah personil masyarakat, sarana prasarana serta biaya operasional.

Tabel V.6 Distribusi Penelitian Terhadap Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Indikator Sumber Daya.

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Personil yang memadai dalam menanggulangi kebakaran hutan	7	-	-	7
2	Sarana dan prasarana dalam menanggulangi kebakaran hutan	5	2	-	7
3	Tersedianya Biaya Operasional dalam menanggulangi kebakaran hutan	4	3	-	7
Jumlah		16	5	-	21
Rata-rata		6	1	-	7
Persentase		80%	20%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.6 dapat diketahui bahwa personil dalam menanggulangi kebakaran hutan dapat dinilai Baik (terimplementasi) berdasarkan jawaban dari responden 7 dari 7 orang menyatakan Baik (terimplementasi), dan untuk indikator pertanyaan kedua mengenai sarana dan prasarana dalam menanggulangi kebakaran hutan yang terjadi di Desa Rimbo Panjang dapat diketahui 4 dari 7 orang mengatakan Baik (terimplementasi) dan 3 dari 7 orang mengatakan Cukup Terimplementasi, sedangkan untuk pertanyaan ketiga mengenai tersedianya biaya

operasional dalam menanggulangi kebakaran hutan, dapat diketahui 4 dari 7 orang mengatakan Baik (terimplementasi) dan 3 dari 7 orang mengatakan Cukup Terimplementasi, hal ini dapat disimpulkan terkait indikator pertanyaan sumber daya berdasarkan hasil dari responden aparat pemerintah dapat dikategorikan Baik (terimplementasi).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustiyardi, ST,M.Si pada tanggal 23 September 2019 beliau menyatakan :

“Dalam pelaksanaan kegiatan pemadaman terkait dengan personil kami telah mengerahkan personil yang cukup baik dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu personil Manggala Agni dan kemudian ditambah oleh masyarakat peduli api, yang merupakan relawan dari desa setempat dan juga dilengkapi dengan sarana prasarana yang ada”.

Sedangkan tanggapan dari responden (Masyarakat Peduli Api) mengenai pertanyaan pada indikator sumber daya :

Tabel V.7 Distribusi Jawaban Responden (Masyarakat Peduli Api) Mengenai Indikator Sumber Daya

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Personil yang memadai dalam menanggulangi kebakaran hutan	4	14	2	20
2	Sarana dan prasarana dalam menanggulangi kebakaran hutan	2	11	7	20
3	Tersedianya Biaya Operasional dalam menanggulangi kebakaran hutan	2	12	6	20
Jumlah		8	37	15	60

Rata-rata	3	12	5	20
Persentase	15%	60%	25%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Pada tabel V.7 bahwa indikator sumber daya berdasarkan jawaban responden (Masyarakat Peduli Api) dapat dinilai Cukup Terimplementasi karena pada indikator pertanyaan pertama terkait dengan personil yang memadai dalam menanggulangi kebakaran hutan 4 dari 20 orang yang mengatakan Baik (terimplementasi), dan 14 orang dari 20 orang yang mengatakan Cukup Terimplementasi, dan 2 orang yang mengatakan Kurang Terimplementasi, kemudian untuk indikator pertanyaan yang kedua terkait dengan sarana dan prasarana dalam menanggulangi kebakaran hutan di Desa Rimbo Panjang, 2 dari 20 orang mengatakan Baik (terimplementasi), 11 dari 20 orang yang mengatakan Cukup Terimplementasi dan 7 dari 20 orang mengatakan Kurang Terimplementasi. Sedangkan untuk indikator tersedianya biaya operasional dalam menanggulangi kebakaran hutan, 2 dari 20 orang mengatakan Baik (terimplementasi), 12 dari 20 orang mengatakan Cukup Terimplementasi dan 5 dari 20 orang mengatakan Kurang Terimplementasi, maka hal ini dapat disimpulkan terkait indikator pertanyaan sumber daya berdasarkan hasil dari responden masyarakat peduli api dapat dikategorikan Cukup Terimplementasi.

Selanjutnya hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Nendri selaku masyarakat peduli api Desa Rimbo Panjang pada tanggal 25 September 2019 beliau menyatakan :

“ Terkait dengan aparat yang melakukan penanggulangan kebakaran, menurut kami kurang, karena tidak sesuai dengan jumlah titik api yang ada dan untuk sarana dan prasarana sangat kurang karna keterbatasan alat pemadam seperti titik sumur bor, mesin pompa air, selang, dan racun api ”

Berdasarkan hasil observasi terkait dengan indikator sumber daya penulis menilai bahwa indikator sumber daya dapat diketahui aparat pemerintah telah menjalankan upaya penanggulangan kebakaran dengan melibatkan personil dan sarana yang ada. Tetapi dari pihak masyarakat menilai bahwa jumlah personil yang melakukan penanganan kebakaran belum cukup dan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta biaya operasional yang belum tersedia.

3. Disposisi

Menurut Katz (Mahmudi,2010:3) mendefenisikan disposisi sebagai kecenderungan untuk berperilaku secara sadar teratur dan sukarela yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal yang berkaitan terhadap tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi program harus memperhatikan sikap agar terhindar dari kesimpang siuran ditengah masyarakat, untuk lebih jelas kita lihat jawaban responden mengenai disposisi pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 Distribusi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah) Mengenai Indikator Disposisi

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Pengetahuan masyarakat dalam menjalankan program masyarakat peduli api	5	2	-	7

2	Pemahaman masyarakat dalam menjalankan program masyarakat peduli api	6	1	-	7
3	Pengawasan yang dilakukan sesuai prosedur dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan	5	2	-	7
Jumlah		16	5	-	21
Rata-rata		5	2	-	7
	1	2	3	4	5
Persentase		80%	20%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.8 diatas diketahui bahwa indikator pertanyaan pertama terkait pada Pengetahuan masyarakat dalam menjalankan program masyarakat peduli api, 5 dari 7 orang yang mengatakan baik (terimplementasi) dan 2 dari 7 orang mengatakan Cukup Terimplementasi, dan pertanyaan indikator kedua terkait pada Pemahaman masyarakat dalam menjalankan program masyarakat peduli api, 6 dari 7 orang responden mengatakan Baik (terimplementasi) dan 1 dari 7 orang mengatakan Cukup Terimplementasi, sedangkan mengenai Pengawasan yang dilakukan sesuai prosedur dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan, 5 dari 7 orang mengatakan Baik (terimplementasi) dan 2 dari 7 orang mengatakan Cukup Terimplementasi. Maka dalam hal ini jawaban responden (Aparat Pemerintah) terhadap indikator disposisi dapat dikategorikan Baik (terimplementasi).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustriyadi, ST,M.Si pada tanggal 23 September 2019 beliau menyatakan :

“Menurut kami selaku dinas merasa masyarakat telah sadar akan permasalahan lingkungan dan dampak kerusakannya, hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi yang kami berikan dan pengawasan kami berikan melalui pembentukan kelompok masyarakat peduli api”.

Sedangkan tanggapan responden (masyarakat peduli api) berdasarkan indikator Disposisi adalah :

Tabel V.9. Distribusi Jawaban Responden (Masyarakat Peduli Api) Mengenai Indikator Disposisi.

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Pengetahuan masyarakat dalam menjalankan program masyarakat peduli api	2	15	3	20
2	Pemahaman masyarakat dalam menjalankan program masyarakat peduli api	3	16	1	20
3	Pengawasan yang dilakukan sesuai prosedur dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan	2	15	3	20
Jumlah		7	46	7	60
Rata-rata		2	16	2	20
Persentase		10%	80%	10%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan pada tabel V.9 terkait jawaban responden (masyarakat peduli api) terhadap indikator disposisi pada pertanyaan pertama mengenai Pengetahuan masyarakat dalam menjalankan program masyarakat peduli api dapat

dikategorikan Cukup Terimplementasi, karena pada indikator pertanyaan pertama 2 dari 20 orang mengatakan Baik (terimplementasi), kemudian 15 orang dari 20 yang mengatakan Cukup Terimplementasi, dan 3 dari 20 orang yang mengatakan Kurang Terimplementasi dan juga pada indikator pertanyaan kedua terkait dengan Pemahaman masyarakat dalam menjalankan program masyarakat peduli api yaitu, 3 dari 20 orang yang mengatakan Baik (terimplementasi), kemudian 16 dari 20 orang yang mengatakan Cukup Terimplementasi, sedangkan 1 dari 20 orang yang mengatakan Kurang Terimplementasi. Sedangkan pada pertanyaan ketiga mengenai Pengawasan yang dilakukan sesuai prosedur dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan, 2 dari 20 orang mengatakan Baik (terimplementasi, 15 dari 20 orang mengatakan Cukup Terimplementasi dan 3 dari 20 orang mengatakan Kurang Terimplementasi. Maka dalam hal ini jawaban responden (masyarakat peduli api) terhadap indikator disposisi dapat dikategorikan Cukup Terimplementasi.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Idris selaku masyarakat peduli api Desa Rimbo Panjang pada tanggal 25 September 2019 beliau menyatakan :

“Terkait dengan kesadaran kami selaku masyarakat setempat sudah sadar bahaya dampak kerusakan lingkungan, tetapi masih ada juga masyarakat pendatang, seperti masyarakat yang tinggal di kota akan tetapi mereka memiliki lahan di desa, yang tidak memperdulikan bahaya dari kerusakan, contohnya dengan cara membuka lahan dengan membakar. Dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui dinas terkait, belum maksimal hal ini masih dibuktikan terjadinya kebakaran hampir setiap tahun”

Berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti berkaitan dengan Indikator Disposisi, penulis menilai bahwa terkait dengan ini dapat diketahui bahwa dari aparat pemerintah untuk indikator pertanyaan ini aparat telah melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Gibson (1998.5.) mengatakan struktur birokrasi adalah suatu penyusunan atau organisasi yang berkenaan dengan tindakan untuk meningkatkan efektifitas organisasi dengan mengadakan perubahan dalam struktur formal dari hubungan tugas dan wewenang. Struktur birokrasi adalah suatu tindakan dan sejauh mana ketertiban pemerintah melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Berikut tanggapan Responden (Aparatur Pemerintah) mengenai Indikator Struktur Birokrasi.

Tabel V.10 Distribusi Jawaban Responden (Aparatur Pemerintah) Mengenai Indikator Struktur Birokrasi

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya wewenang yang jelas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup	5	2	-	7
2	Adanya koordinasi antara pihak instansi yang yang terkait	5	2	-	7
3	Adanya tanggung jawab antara instansi yang terkait dalam menanggulangi kebakaran hutan	6	1	-	7

Jumlah	16	5	-	21
Rata-rata	5	2	-	7
Persentase	75%	25%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Dari tabel V.9 diatas diketahui bahwa indikator pertanyaan pertama terkait pada adanya wewenang yang jelas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, 5 dari 7 orang yang mengatakan Baik (terimplementasi) dan 2 dari 7 orang yang mengatakan Cukup Terimplementasi, dan pertanyaan indikator kedua terkait pada adanya koordinasi antara pihak instansi yang terkait, 5 dari 7 orang responden mengatakan Baik (terimplementasi), dan 2 mengatakan Cukup Terimplementasi. sedangkan pertanyaan indikator yang ketiga mengenai Adanya tanggung jawab antara instansi yang terkait dalam menanggulangi kebakaran hutan, 6 dari 7 orang mengatakan Baik (terimplementasi) dan 1 dari 7 orang mengatakan Cukup Terimplementasi. Maka dalam hal ini jawaban responden (Aparat Pemerintah) terhadap indikator struktur birokrasi dapat dikategorikan Baik (terimplementasi).

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustriyadi, ST,M.Si pada tanggal 23 September 2019 beliau menyatakan.

“Terkait dengan pembagian wewenang sudah kami jelaskan disaat sosialisasi terhadap masyarakat kemudian untuk koordinasi ketika terjadi kebakaran kami berkoordinasi dengan instansi yang terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, dan TNI/POLRI”

Sedangkan tanggapan Responden (Masyarakat Peduli Api) berdasarkan Indikator Struktur Birokrasi adalah :

Tabel V.11 Penilaian Responden (Masyarakat Peduli Api) Mengenai Struktur Birokrasi.

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Adanya wewenang yang jelas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup	3	15	2	20
2	Adanya koordinasi antara pihak instansi yang terkait	5	13	2	20
3	Adanya tanggung jawab antara instansi yang terkait dalam menanggulangi kebakaran hutan	3	14	3	
Jumlah		11	42	7	40
Rata-rata		4	14	2	20
Persentase		25%	60%	15%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan pada Tabel V.11 jawaban responden (masyarakat peduli api) terhadap Indikator struktur birokrasi dapat dikategorikan Cukup Terimplementasi, karena pada Indikator pertanyaan pertama yaitu adanya wewenang yang jelas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, 3 dari 20 orang mengatakan Baik (terimplementasi), kemudian 15 dari 20 orang yang mengatakan Cukup Terimplementasi, sedangkan 2 dari 20 orang yang mengatakan Kurang Terimplementasi dan pada Indikator pertanyaan kedua terkait dengan adanya koordinasi antara pihak instansi yang terkait, 5 dari 20 orang yang mengatakan Baik (terimplementasi), kemudian 13 dari 20 orang mengatakan Cukup Terimplementasi, dan 2 dari 20 orang mengatakan Kurang Terimplementasi.

sedangkan pada indikator pertanyaan ketiga mengenai adanya tanggung jawab antara instansi yang terkait dalam menanggulangi kebakaran hutan, 3 dari 20 orang mengatakan Baik (terimplementasi), 14 dari 20 orang mengatakan Cukup Terimplementasi dan 3 dari 20 orang mengatakan Kurang Terimplementasi. Maka dalam hal ini jawaban responden (Masyarakat Peduli api) terhadap indikator struktur birokrasi dapat dikategorikan Cukup Terimplementasi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Saprindi selaku Masyarakat Peduli Api Desa Rimbo Panjang pada tanggal 25 September 2019 beliau Menyatakan :

“Untuk pembagian wewenang kami tidak mengetahui secara jelas siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah penanganan lingkungan dan untuk koordinasi pihak pemerintah memang sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan penanggulangan kebakaran”.

Selanjutnya dari Empat Indikator yang telah diuraikan diatas mengenai pelaksanaan Program Masyarakat Peduli Api, disajikan Tabel Rekapitulasi Penilaian terhadap jawaban Responden.

Tabel V.12 Rekapitulasi Jawaban Responden (Aparat Pemerintah)

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Komunikasi	6	1	-	7
2	Sumber Daya	6	1	-	7
3	Disposisi	5	2	-	7
4	Struktur Birokrasi	5	2	-	7
Jumlah		22	6	-	28

1	2	3	4	5
Rata-rata	6	1	-	7
Persentase	80%	20%	-	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Sesuai tabel tersebut dapat dikatakan penilaian terhadap jawaban Aparat Pemerintah terkait peran serta masyarakat dapat dikategorikan Baik (terimplementasi), karena 5 dari 7 orang responden atau 80 % dari total responden yang mengatakan Baik (terimplementasi) atau sesuai dengan teknik penilaian yang telah dibuat maka hasil Rekapitulasi dari jawaban Responden Aparat Pemerintah dinyatakan Baik (Terimplementasi).

Sedangkan dilihat dari Rekapitulasi Penilaian secara keseluruhan Responden (Masyarakat Peduli Api) sesuai dengan tabel berikut :

Tabel V.13 Rekapitulasi Penilaian Responden Keseluruhan (Masyarakat Peduli Api)

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Komunikasi	3	15	2	20
2	Sumber Daya	3	15	2	20
3	Disposisi	2	16	2	20
4	Struktur Birokrasi	4	14	2	20
Jumlah		12	60	8	80
Rata-rata		3	15	2	20
Persentase		15%	75%	10%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Sesuai Tabel tersebut diketahui penilaian terhadap jawaban tentang Implementasi Program Masyarakat Peduli Api Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dikategorikan “ Cukup Terimplementasi”. Karena rata-rata dari 20 orang Responden yang menyatakan Cukup Terimplementasi adalah 15 orang dengan persentasi 75%, maka sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat dapat diketahui bahwa 75% berada pada interval 67% - 100 % dengan Baik (Terimplementasi).

Selanjutnya dapat dilihat Rekapitulasi penilaian secara keseluruhan mengenai Implementasi Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Tabel V.14 Rekapitulasi Penilaian Secara Keseluruhan Mengenai Implementasi Program Organisasi Masyarakat Peduli Api

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Aparat Pemerintah	6	1	-	7
2	MPA	3	15	2	20
Jumlah		9	16	2	27
Rata-rata		4	8	1	13
Persentase		30%	60%	10%	100%

Sumber : Data Olahan 2019

Sesuai data tersebut dapat dikatakan penilaian terhadap jawaban tentang Pelaksanaan Program Masyarakat Peduli Api (Desa Rimbo Panjang) berdasarkan

Rekapitulasi jawaban Responden (aparatur Pemerintah dan MPA) dapat di Kategori Cukup Terimplementasi. Karena dari 13 orang responden yang menyatakan Pelaksanaan Program Masyarakat Peduli Api ini Cukup Terimplementasi sebanyak 8 orang responden atau 60 %. Maka sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat maka dapat diketahui bahwa 60% berada di interval antara 33%-66% dengan Cukup Terimplementasi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya penilaian Cukup Terimplementasi dari Masyarakat Peduli Api terkait masih kurangnya sanksi terhadap pelaku pembakaran lahan secara liar, kurangnya personil, sarana dan prasarana dan biaya operasional dalam menanggulangi kebakaran hutan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait, tanggung jawab antara instansi serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait.

C. Hambatan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung dilapangan dan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pemantauan dan Kerusakan Lingkungan Hidup diketahui beberapa hambatan yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan ini, adapun bentuk hambatan yang dihadapi adalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanggulangan kebakaran yang terjadi di Desa Rimbo Panjang sehingga proses pemadaman yang dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti mesin

pompa air, selang, racun api dan titik sumur bor(sumber air), dan juga selain itu yang menjadi hambatan yaitu terbatasnya personil dalam saat penanganan kebakaran .

2. Terbatasnya biaya untuk mendukung proses pemadaman, biaya tersebut ditujukan untuk kebutuhan seperti bahan bakar dan kebutuhan konsumsi petugas dan relawan dalam proses pemadaman, selain itu ada juga hambatan yang terjadi sehingga kerusakan lingkungan terjadi di beberapa desa dan khususnya Desa Rimbo Panjang yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak mengerti bahaya dampak dari kerusakan sehingga masih ada oknum-oknum yang tetap melakukan membuka lahan dengan cara membakar, ini yang membuktikan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait yaitu dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan sehingga program-program yang telah dijalankan oleh dinas masih kurang efektif karena kebakaran masih tetap terjadi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melakukan upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Desa

Rimbo Panjang dapat disimpulkan yakni :

1. Implementasi Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, melalui OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar masuk dalam kategori Kurang Terimplementasi, hal ini dapat dilihat dari jawaban Responden dari 4 indikator yaitu indikator komunikasi, indikator sumber daya, indikator disposisi, dan indikator struktur birokrasi. Dari beberapa indikator yang dijelaskan terdapat indikator Disposisi yang paling menonjol karena berkaitan tentang kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan program masyarakat peduli api dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di desa rimbo panjang.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi kebakaran hutan lahan di Desa Rimbo Panjang, ini adalah Kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanggulangan kebakaran yang terjadi di Desa Rimbo Panjang sehingga proses pemadaman yang dilakukan membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti

mesin pompa air, selang, racun api dan titik sumur bor(sumber air), dan juga selain itu yang menjadi hambatan yaitu terbatasnya personil dalam saat penanganan kebakaran .

3. Terbatasnya biaya untuk mendukung proses pemadaman, biaya tersebut ditujukan untuk kebutuhan seperti bahan bakar dan kebutuhan konsumsi petugas dan relawan dalam proses pemadaman, selain itu ada juga hambatan yang terjadi sehingga kerusakan lingkungan terjadi di beberapa desa dan khususnya Desa Rimbo Panjang yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak mengerti bahaya dampak dari kerusakan sehingga masih ada oknum-oknum yang tetap melakukan membuka lahan dengan cara membakar, ini yang membuktikan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi terkait yaitu dinas lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan sehingga program-program yang telah dijalankan oleh dinas masih kurang efektif karena kebakaran masih tetap terjadi.

B. Saran

Setelah adanya hasil pembahasan terkait dengan pelaksanaan Program masyarakat peduli api dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, peneliti memberikan saran –saran berikut :

1. Dinas atau Pemerintah Daerah disarankan dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rimbo Panjang melalui sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok tani, serta pemantaun yang dilakukan oleh instansi terkait harus lebih ditingkatkan, apalagi saat musim kemarau, karna wilayah di Desa

Rimbo Panjang tersebut merupakan wilayah rawan kebakaran karena tingkat ketebalan gambut sangat tinggi, yang dapat menimbulkan kebakaran yang cepat.

2. Disarankan untuk pemerintah atau instansi terkait agar segala sesuatu tindakan yang dapat merusak kelestarian hutan dan lahan yang dilakukan oleh masyarakat secara sengaja harus ditindak secara tegas oleh aparat keamanan agar kelestarian lingkungan masyarakat dapat tetap terjaga dari kabut asap yang melanda wilayah daerah setempat, karena dapat merugikan masyarakat khusus anak-anak yang dapat menyebabkan dampak negative seperti penyakit ISPA.
3. Dan saran Untuk masyarakat yang ada di Desa Rimbo Panjang agar lebih aktif dan peduli terhadap lingkungan khususnya lahan yang ada di daerah setempat dan juga harus menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar karna akan berdampak negative ke lingkungan, kelompok masyarakat harus juga aktif meminta dari pihak pemerintah atau instansi terkait lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana serta biaya untuk kegiatan pemadaman saat terjadi kebakaran, karena resiko yang dihadapi oleh masyarakat sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta
- Andi Azikin, Syaifei, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta
- Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Dunn, Wiliam N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edwards III, Goerge. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C Robert L. Peabody
- Ermaya, 2000. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Rajawali
- Fadhillah, Nurul. Dkk. 2016. Pengendalian Kebakaran Hutan Oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) Di Taman Nasional Gunung Ciremai. *Jurnal Media Konservasi*. Fakultas Kehutanan. IPB, Bandung.
- Friedrich (Dalam Wahab 2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers.
- Gibson, J.L. dkk. 1998. *Organisasi Prilaku, Struktur, Proses*, Jakarta : Terjemahan Erlangga
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Cristine C.S.T .2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Marnelly. Romi, T. 2018. Lembaga Masyarakat Peduli Api : Studi Tentang Hambatan Pelaksanaan Peran. *Jurnal Antropologi*. Fisip Unand.
- Mustofa, D. 2014. *Struktur Birokrasi Pemerintah*. Bandung : Alfabeta
- Ndraha, Talidziduhu, 2011. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru) 1*. Jakarta, Rineka cipta
- _____, 2011. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru) 2*, Jakarta, Rineka cipta
- Ndara, Taliziduhu, 2003, *Kybernology : Ilmu Pemerintahan*, Jakarta
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*, PT, Sinar Grafika, Jakarta
- Nugroho D Riant, 2005, *Analisa Kebijakan Publik*, Jakarta Elexmedia
- Rewansyah, A. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Government*. Jakarta : CV. Yusiantanas Prima
- Ripley Dan Franklin (Dalam Winarno 2012) *Kebijakan Publik (Teori, Prosedur, dan studi kasus)*. Jakarta, PT. Buku Seru.

- Salam, Darma Setyawan, 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sedarmayanti, 2012, *Good Governance edisi Revisi*, Bandung, Mandar Maju
- Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan*, Alaf Riau, Graha UNRI Press Pekanbaru.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Sistim pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka cipta
- Syafei, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta
- Thoha, Miftah, 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Yogyakarta, Rajawali Pers.
- Yuhana, Wiji. Iskandar. 2017. Partisipasi dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut (Studi Kasus Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya). *Jurnal Hutan Lestari*, Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Winardi, 1990. *Asas-asas Manajemen*, Bandung : Mandar maju
- Winarno. Budi. 2007. *“Kebijakan Publik” (Teori dan Proses)*. PT. Buku Kita.

Dokumen :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/menhut-11/2009 Tentang

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan